

**Tata Kelola Rantai Pasok Pangan Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis:
Peran Pemerintah Daerah dan SPPG menuju Kemandirian Pangan
Berkelanjutan**

¹Andi M Yusuf, ²Nurul Aziza, ³Alisha Putri Reskiana

¹Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Tamalanrea Makassar,
(0411) 586200, 90245, Indonesia

¹E-mail korespondensi: yusufkeren025@gmail.com

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan penguatan ekonomi daerah. Artikel ini bertujuan menganalisis tata kelola rantai pasok pangan lokal dalam program MBG dengan menyoroti peran pemerintah daerah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjamin kontinuitas distribusi serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan metode library research atau literature review dengan sumber data sekunder berupa artikel jurnal, regulasi, laporan pemerintah, dan berita resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa rantai pasok MBG memerlukan pengaturan yang terintegrasi mulai dari produksi, pengumpulan, pengolahan, hingga distribusi pangan. Pemerintah daerah berperan penting dalam koordinasi lintas sektor, fasilitasi produsen lokal, dan sinkronisasi kebijakan, sedangkan SPPG menjadi simpul operasional yang menentukan mutu, keamanan, dan ketepatan distribusi makanan. Di sisi lain, hambatan utama yang ditemukan meliputi fluktuasi pasokan musiman, keterbatasan infrastruktur logistik, lemahnya sistem informasi, serta fragmentasi kelembagaan. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan kemitraan dengan pelaku pangan lokal, standardisasi mutu, digitalisasi rantai pasok, dan dukungan regulasi daerah agar MBG dapat berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan

Kata kunci: MBG; rantai pasok pangan lokal; pemerintah daerah; SPPG; ketahanan pangan

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal (MBG) program is a strategic government policy aimed not only at improving students' nutritional status but also at strengthening food security through the utilization of local food resources and the enhancement of regional economies. This article aims to analyze the supply chain governance of local food within the MBG program, highlighting the roles of local governments and the Nutritional Fulfillment Service Units (SPPG) in ensuring distribution continuity and the precise targeting of beneficiaries. This study employs a library research or literature

review method, utilizing secondary data sources such as journal articles, regulations, government reports, and official news releases. The findings indicate that the MBG supply chain requires integrated management spanning from food production, collection, and processing to distribution. Local governments play a crucial role in cross-sector coordination, facilitating local producers, and synchronizing policies, while the SPPG serves as the operational hub that determines food quality, safety, and distribution accuracy. On the other hand, the primary obstacles identified include seasonal supply fluctuations, limited logistical infrastructure, weak information systems, and institutional fragmentation. Based on these findings, it is essential to strengthen partnerships with local food actors, standardize quality, digitalize the supply chain, and secure local regulatory support to ensure the MBG program operates effectively, inclusively, and sustainably.

Keywords: MBG; local food supply chain; local government; SPPG; food security

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang tidak hanya bertumpu pada aspek pemenuhan gizi, tetapi juga pada kemampuan negara membangun sistem pangan publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Dalam kerangka itu, MBG perlu dibaca sebagai mekanisme yang menghubungkan produksi, pengumpulan, pengolahan, distribusi, dan penyajian pangan dalam satu rantai nilai yang saling terkait. Sejumlah kajian menegaskan bahwa keberhasilan program semacam ini sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, koordinasi antarpelaku, dan kemampuan lembaga pelaksana untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi daerah (Partini & Sari, 2022; Prabowo, 2010). Pada saat yang sama, pangan lokal memiliki posisi yang semakin penting dalam menjamin ketahanan pangan nasional (Kabuum, 2026). Pangan lokal dipandang lebih adaptif terhadap kondisi agroekologi setempat, memiliki rantai distribusi yang lebih pendek, serta berpotensi memperkuat diversifikasi konsumsi masyarakat. Kajian tentang ketahanan pangan dan pangan lokal menunjukkan bahwa ketergantungan pada satu komoditas pangan membuat sistem pangan rentan terhadap guncangan harga, gangguan impor, dan perubahan iklim, sehingga diversifikasi berbasis pangan lokal menjadi pilihan kebijakan yang lebih tahan krisis (Siregar et al., 2025; Mariyanto, 2025; Yakub et al., 2025). Di tingkat praktis, penguatan produksi dan konsumsi pangan lokal juga berkaitan erat dengan pengembangan hilirisasi, inovasi teknologi, dan pembentukan pasar yang lebih dekat dengan produsen (Arifin & Solihin, 2025).

Dalam konteks implementasi MBG, pemanfaatan pangan lokal bukan semata pilihan teknis, melainkan strategi tata kelola yang memiliki implikasi ekonomi dan kelembagaan. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketika program pangan publik dirancang dengan melibatkan petani, nelayan, UMKM, koperasi, dan BUMDes, maka manfaatnya dapat meluas menjadi penguatan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan pelaku usaha, dan penciptaan lapangan kerja di wilayah. Namun, manfaat tersebut hanya akan muncul apabila ada kepastian permintaan, standar mutu yang jelas, dan hubungan kemitraan yang stabil antara pemasok lokal dan unit pelaksana program (Arifin & Solihin, 2025; Ramadhan & Khumaidi, 2025; Harold et al., 2025). Karena itu, MBG dapat dipahami sebagai instrumen yang sekaligus menggerakkan fungsi sosial dan fungsi ekonomi dari sistem pangan daerah.

Peran pemerintah daerah menjadi sangat menentukan karena daerah berada pada posisi paling dekat dengan produsen, jaringan distribusi, dan penerima manfaat. Pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan mengoordinasikan lintas sektor, memfasilitasi pemenuhan bahan baku, memperkuat infrastruktur pascapanen, serta memastikan bahwa kebijakan pusat dapat dijalankan sesuai kapasitas dan karakteristik wilayah. Kajian di berbagai daerah memperlihatkan bahwa lemahnya sinkronisasi data, koordinasi vertikal-horizontal, dan kapasitas birokrasi dapat menghambat efektivitas kebijakan pangan, bahkan ketika regulasi formal sudah tersedia (Nathan, 2025; Prabowo, 2010). Dalam situasi seperti itu, pemerintah daerah perlu berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan realitas lapangan, agar distribusi pangan lebih tepat, stabil, dan tidak terputus.

Di sisi operasional, SPPG menjadi simpul penting yang menentukan apakah kebijakan MBG dapat berjalan dengan baik di lapangan. SPPG bertugas mengelola proses penerimaan bahan, pengolahan makanan, pengendalian mutu, penyimpanan, hingga penyaluran kepada sasaran. Sejumlah penelitian implementatif menunjukkan bahwa masalah yang sering muncul justru berada pada level ini, seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan, kompetensi petugas, penjadwalan distribusi, dan kesesuaian menu dengan standar gizi serta keamanan pangan (Putri & Fairuzzaman, 2026). Ketika kapasitas SPPG belum kuat, risiko salah distribusi, keterlambatan layanan, dan turunnya kualitas makanan menjadi lebih besar. Karena itu, penguatan SPPG tidak dapat dipisahkan dari dukungan pemerintah daerah, ketersediaan sistem informasi, dan model pengawasan yang lebih terintegrasi.

Selain persoalan teknis, MBG juga memunculkan dimensi kelembagaan dan yuridis yang penting. Kajian hukum menunjukkan bahwa legitimasi program, pembagian kewenangan, akuntabilitas anggaran, dan perlindungan terhadap penerima manfaat harus dirumuskan secara jelas agar program tidak rentan terhadap masalah koordinasi maupun sengketa tata kelola. Di saat yang sama, literatur tentang tata kelola pangan menekankan bahwa sistem pangan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan multilevel, multiactor, dan kolaboratif, sebab kebijakan pangan tidak dapat bekerja secara efektif jika hanya mengandalkan satu lembaga atau satu level pemerintahan (McKeon, 2021). Dengan demikian, MBG menuntut desain tata kelola yang mampu menyatukan aspek hukum, administrasi, logistik, dan partisipasi lokal dalam satu kerangka kerja yang konsisten.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan utama: 1) bagaimana tata kelola rantai pasok pangan lokal diorganisasikan dan dikelola dalam program MBG?, 2) bagaimana peran pemerintah daerah dan SPPG dalam memastikan kontinuitas distribusi dan ketepatan sasaran penerima manfaat?, 3) apa saja hambatan struktural dan kelembagaan yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan apa yang relevan untuk memperkuat implementasi program ke depan? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan tata kelola rantai pasok pangan lokal dalam program MBG secara empiris dan kelembagaan, mengidentifikasi dinamika peran pemerintah daerah dan SPPG dalam proses implementasi dan koordinasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang berorientasi pada penguatan tata kelola dan ketahanan pangan tingkat lokal.

MATERI DAN METODE

Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif-interpretatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) atau literature review. Paradigma ini dipilih karena tujuan penelitian bukan menguji hubungan kausal secara statistik, melainkan memahami secara mendalam bagaimana tata kelola rantai pasok pangan lokal dibangun, dijalankan, dan dihadapkan pada berbagai kendala kelembagaan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menafsirkan gagasan, kebijakan, dan temuan empiris dari berbagai sumber sehingga dapat disusun sintesis konseptual yang relevan untuk menjawab fokus kajian. Secara metodologis, artikel ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif karena memetakan fakta-fakta konseptual dan empiris yang muncul dalam literatur, serta analitis karena hasil pembacaan tidak hanya disajikan ulang, tetapi juga dikritisi dan dibandingkan untuk menemukan pola, kesenjangan, dan implikasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tetap memiliki orientasi problem solving, yaitu merumuskan arah penguatan tata kelola rantai pasok pangan lokal yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan mendukung kemandirian pangan.

Sumber Data

Dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai rujukan utama. Dimana data sekunder ini bersumber dari artikel ilmiah yang secara keseluruhan sumber data ini membahas Program MBG, rantai pasok pangan lokal, tata kelola pemerintahan daerah, serta peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setidaknya terdapat 27 artikel ilmiah yang dinilai sangat relevan dalam menjawab tiga pertanyaan penelitian tadi. Kemudian, sumber data yang dipilih juga dipilih berdasarkan tiga prinsip utama yaitu relevansi substantif, kebaruan informasi, dan kredibilitas sumber. Relevansi substantif berarti setiap referensi harus berkaitan langsung dengan salah satu dari tiga pertanyaan penelitian. Kebaruan informasi berarti sumber terbaru, terutama yang membahas implementasi MBG dan SPPG, diberi bobot lebih besar. Kredibilitas sumber berarti literatur dari jurnal ilmiah bereputasi, dokumen resmi pemerintah, serta situs institusi resmi diprioritaskan dibandingkan sumber populer yang tidak memiliki basis data memadai.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, pembacaan kritis, dan pencatatan tematik terhadap isi literatur. Setiap sumber dibaca secara menyeluruh, kemudian informasi pentingnya diekstraksi ke dalam matriks analisis yang memuat identitas sumber, fokus kajian, temuan utama, kontribusi terhadap pertanyaan penelitian, serta catatan keterbatasan. Proses ini memudahkan peneliti menilai apakah suatu referensi benar-benar mendukung pembahasan atau hanya memiliki kaitan perifer. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik-sintesis yang meliputi 3 tahap. Tahap pertama adalah open coding, yaitu memberi kode pada bagian-bagian teks yang berkaitan dengan organisasi rantai pasok, peran pemerintah daerah, peran SPPG, kendala struktural, dan rekomendasi kebijakan. Tahap kedua adalah kategorisasi, yakni mengelompokkan kode ke dalam tema besar yang selaras dengan pertanyaan penelitian. Tahap ketiga adalah sintesis naratif, yaitu menyusun kesimpulan konseptual yang menjelaskan pola hubungan antar-tema secara runtut dan argumentatif. Untuk menjaga ketelitian, setiap temuan dari satu sumber dibandingkan dengan temuan sumber lain melalui teknik triangulasi literatur. Jika

terdapat perbedaan pandangan, peneliti menilai kekuatan argumentasi, jenis data, dan posisi sumber dalam konteks kebijakan. Dengan demikian, hasil akhir tidak berupa kumpulan ringkasan, melainkan sintesis yang menunjukkan kecenderungan umum, titik temu, serta area yang masih perlu diperkuat oleh penelitian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran dan proses seleksi literatur yang telah dilakukan, diperoleh 27 artikel ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian ini. Artikel-artikel tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut melalui proses sintesis literatur untuk mengidentifikasi karakteristik utama masing-masing studi, meliputi fokus kajian, serta temuan utama yang dihasilkan. Proses sintesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai Tata Kelola Rantai Pasok Pangan Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian. Ringkasan hasil sintesis dari artikel-artikel terpilih kemudian disajikan secara sistematis dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1.

No	Penulis & Tahun	Judul Referensi	Fokus Kajian	Temuan Utama
1	Ashari et al., 2025	Pengembangan Model Optimalisasi Rantai Pasok Pangan Laut Berbasis Smart Fisheries Village Untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis di Desa Tanggetada	Optimalisasi rantai pasok pangan laut berbasis SFV untuk mendukung MBG, dengan digitalisasi dan melibatkan komunitas nelayan.	Model SFV dinilai valid dan praktis; meningkatkan pendapatan nelayan, partisipasi masyarakat, serta ketepatan distribusi pangan bergizi ke sekolah.
2	Aziizah et al., 2026	Optimalisasi Rantai Pasok Pangan Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus Integrasi UMKM dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kendal	Integrasi UMKM dan SPPG dalam rantai pasok pangan lokal MBG, termasuk distribusi, mutu, dan logistik.	Fluktuasi produksi musiman, cold chain terbatas, dan koordinasi lemah menjadi hambatan utama; rekomendasinya penguatan UMKM, kemitraan jangka panjang, dan insentif Pemda.
3	Aulia, 2026	Manajemen Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional: Studi Literatur	Kerangka konseptual manajemen rantai pasok MBG sebagai pengadaan pangan publik,	Keberhasilan MBG ditentukan oleh tata kelola pengadaan, hubungan pemasok, keamanan pangan, diversifikasi

			dengan digitalisasi dan monitoring.	komoditas, integrasi data, dan monitoring efektif.
4	Bajuri et al., 2026	Kebijakan Tata Kelola Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Terhadap Kelayakan Implementasi Berkelanjutan Yang Berdampak Secara Multiplier Effect Dengan Pemanfaatan Teknologi	Tata kelola MBG, teknologi, koordinasi pemangku kepentingan, dan dampak ekonomi lokal (multiplier effect).	Tata kelola yang baik dan pemanfaatan teknologi meningkatkan transparansi, monitoring, akuntabilitas, serta memperkuat keberlanjutan implementasi.
5	Hakim & Yuliana, 2025	Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis	Landasan hukum MBG, legitimasi kelembagaan, akuntabilitas anggaran, dan koordinasi pusat-daerah.	Perpres sah secara formal, tetapi rentan dari sisi legitimasi demokratis, akuntabilitas fiskal, dan keberlanjutan kelembagaan tanpa penguatan undang-undang.
6	Agnia et al., 2025	Efektivitas Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang	Implementasi MBG di tingkat SPPG dengan fokus efektivitas layanan dan kendala operasional.	Efektivitas paling kuat ada pada pembatasan akses; kelemahan muncul pada ketimpangan administrasi, beban kerja, dan kondisi kerja yang kurang mendukung.
7	Febryanti et al., 2025	Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang)	Pelaksanaan MBG di sekolah, koordinasi dengan SPPG, penyesuaian jadwal distribusi, dan faktor penghambat.	Program berjalan, tetapi belum ada regulasi tertulis di sekolah; hambatan utama ada pada anggaran dan tata kelola sekolah.
8	Putri Fairuzzama, 2026	Pertanggungjawaban Pemerintah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan	Akuntabilitas hukum pemerintah dan SPPG atas risiko keamanan	Pemerintah/BGN bertanggung jawab secara administratif, sementara SPPG dapat dimintai

		Bergizi Gratis (MBG) serta Upaya Hukum bagi Korban Keracunan	pangan serta mekanisme perlindungan korban.	tanggung jawab pidana bila lalai; perlu penguatan pengawasan dan alur pelaporan darurat.
9	Partini & Sari, 2022	Kebijakan Pengembangan Ketahanan Pangan Lokal	Diversifikasi pangan lokal, rantai pasok pendek, dan kebijakan pengembangan pangan lokal.	Pangan lokal seperti sagu, jagung, dan singkong dinilai mendukung ketahanan pangan karena dekat dengan sumber produksi dan sesuai agroekologi lokal.
10	Siregar et al., 2025	Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal: Studi Literatur sebagai Transformasi Pangan Menuju Indonesia Maju 2045	Transformasi pangan berbasis sumber daya lokal, diversifikasi, dan kolaborasi multisektor.	Diversifikasi sumber pangan lokal penting untuk mengurangi ketergantungan pada beras serta memperkuat sistem pangan yang inklusif dan tahan krisis.
11	Mariyanto, 2025	Strategi Kebijakan Industri Pangan Lokal sebagai Antisipasi Menghadapi Krisis Pangan Global di Indonesia	Penguatan industri pangan lokal, hilirisasi, dan kebijakan pengadaan berbasis produk lokal.	Pengembangan sentra pengolahan dan penguatan UMKM/koperasi menjadi strategi utama untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor.
12	Arifin & Solihin, 2025	Hilirisasi Pangan Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi	Hilirisasi pangan, nilai tambah produk lokal, distribusi modern, dan ketahanan ekonomi.	Hilirisasi meningkatkan nilai tambah dan membuka pasar baru, tetapi masih terkendala infrastruktur, literasi teknologi, dan pembiayaan.
13	Nathan, 2025	Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan:	Peran pemerintah daerah, koordinasi	Fragmentasi kelembagaan, kapasitas birokrasi yang lemah, dan

		Sinergi Kebijakan dan Administrasi Publik di Merauke	lintas sektor, dan tata kelola ketahanan pangan lokal.	minimnya sinkronisasi pusat-daerah menghambat ketahanan pangan; perlu forum koordinasi dan sistem informasi terpadu.
14	Prabowo, 2010	Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia	Kebijakan umum ketahanan pangan nasional, pembatasan impor, lahan, teknologi, dan diversifikasi.	Ketahanan pangan memerlukan kebijakan produksi domestik, perlindungan lahan, teknologi pertanian, dan diversifikasi konsumsi.
15	Putra et al., 2025	Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Tangerang	Peran pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam ketahanan pangan perkotaan.	Keberhasilan dipengaruhi regulasi, pelatihan, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi urban farming; hambatan utama terkait lahan dan adopsi teknologi.
16	Ramadhan & Khumaidi, 2025	Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Program Ketahanan Pangan Di Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan	BUMDes dalam pengelolaan program ketahanan pangan desa dan distribusi hasil pertanian.	BUMDes dapat membantu pengelolaan pangan desa, tetapi konteksnya sangat lokal dan tidak langsung membahas MBG.
17	Harold et al., 2025	Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone	Kontribusi BUMDes pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan desa.	BUMDes meningkatkan akses pasar dan kesejahteraan petani, tetapi tidak secara langsung mengulas MBG atau SPPG.
18	Fahrian & Putra, 2026	Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Risiko Pelaksanaan Program Makan	Risiko hukum dalam skema kemitraan MBG, termasuk keamanan pangan dan	Kemitraan dengan swasta memunculkan isu tanggung jawab risiko; perlu evaluasi regulasi

		Bergizi Gratis pada Skema Kemitraan	tanggung jawab pihak pelaksana.	agar tujuan hukum MBG tetap tercapai.
19	Subianto et al., 2026	Evaluasi Komprehensif dan Analisis Yuridis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025: Akuntabilitas Fiskal, Utilitas Sosial, dan Patologi Kepatuhan Mitra	Evaluasi regulasi MBG, akuntabilitas fiskal, kepatuhan mitra, dan masalah rantai pasok.	Sentralisasi fiskal dan ketidakpatuhan mitra menjadi masalah besar; dibutuhkan kerangka hukum pengadaan dan pembiayaan supply chain financing yang lebih inklusif.
20	Aramendi et al., 2023	Characterisation of food governance for alternative and sustainable food systems: a systematic review	Tata kelola pangan multilevel dan multaktor dalam sistem pangan alternatif berkelanjutan.	Kerangka tata kelola yang kuat perlu mempertimbangkan struktur, jaringan aktor, dan keberlanjutan sistem pangan.
21	Mckeen, 2021	Global Food Governance	Tata kelola pangan global, demokratisasi kebijakan pangan, dan pengurangan dominasi korporasi.	Tata kelola pangan yang baik harus memperkuat hak produsen kecil dan keluarga serta mengurangi dominasi aktor besar.
22	Yakub et al., 2025	Strategi Petani dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Strategi produsen lokal untuk kemandirian pangan, termasuk diversifikasi, teknologi sederhana, dan kelembagaan tani.	Kelembagaan tani, teknologi sederhana, dan pembiayaan mandiri memperkuat kemampuan produksi lokal.
23	Kesumawardani & Hamimah, 2026	Optimalisasi Kebijakan Hukum dan Inovasi Teknologi untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan	Hukum, inovasi teknologi, dan perlindungan sumber daya alam untuk swasembada pangan berkelanjutan.	Kebijakan hukum yang selaras dengan inovasi teknologi menjadi kunci swasembada pangan jangka panjang.

24	Wahida et al., 2025	Dinamika tingkat kemandirian pangan: implikasinya terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional	Tren kemandirian pangan Indonesia dan implikasinya terhadap kebijakan nasional.	Kemandirian pangan cenderung menurun; kebijakan perlu memperkuat produksi, lahan, teknologi, dan diversifikasi konsumsi.
25	Novita et al., 2025	Implementasi Kebijakan Perbapanas Nomor 10 Tahun 2022 Serta Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir	Implementasi kebijakan peta ketahanan dan kerentanan pangan daerah, termasuk faktor penghambat koordinasi dan data.	Hambatan utama ada pada anggaran, SDM, koordinasi, ego sektoral, dan kualitas data; regulasi jelas menjadi faktor pendukung.
26	Gunawan, 2025	Koordinasi Lintas Sektor dalam Menjaga Ketahanan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya	Koordinasi lintas sektor, sinkronisasi data, dan tata kelola ketahanan pangan daerah.	Koordinasi sudah berjalan, tetapi masih ada masalah pada koordinasi vertikal-horizontal dan perbedaan interpretasi target.
27	Kabuam, 2026	Tata Kelola Ketahanan Pangan Daerah Perbatasan: Sinergi Pemerintah dan Komunitas Lokal di Merauke	Kolaborasi pemerintah dan komunitas lokal dalam tata kelola ketahanan pangan wilayah perbatasan.	Keberhasilan bergantung pada kolaborasi partisipatif berbasis kearifan lokal, forum koordinasi, dan sistem informasi terpadu.

Sumber. Data diolah oleh Penulis (2026)

Secara keseluruhan, 27 artikel ini memberikan gambaran jika keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh keterpaduan rantai pasok pangan lokal, penguatan kapasitas pemerintah daerah, dan efektivitas SPPG sebagai pelaksana teknis. Rantai pasok yang baik memungkinkan pangan lokal masuk ke program secara stabil; pemerintah daerah memastikan koordinasi kebijakan dan dukungan ekosistem; sedangkan SPPG menjamin mutu, distribusi, dan ketepatan layanan. Ketiga unsur ini saling mengunci dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di sisi lain, hambatan yang muncul menunjukkan bahwa implementasi MBG masih membutuhkan penataan lebih lanjut pada level infrastruktur, informasi, kelembagaan, dan regulasi. Literatur yang ditelaah mengarah pada kesimpulan bahwa MBG akan lebih efektif apabila tidak didekati sebagai program distribusi makanan jangka pendek, melainkan sebagai tata kelola pangan publik berbasis wilayah yang menghubungkan kebijakan gizi, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal.

Tata Kelola Rantai Pasok Pangan Lokal dalam Program MBG

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa tata kelola rantai pasok pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya dibangun melalui tiga simpul besar, yaitu produksi dan agregasi bahan pangan, pengolahan serta standarisasi mutu, dan distribusi ke unit layanan penerima manfaat. Pola ini menegaskan bahwa MBG tidak berdiri sebagai program konsumsi semata, melainkan sebagai sistem pengadaan pangan publik yang menuntut integrasi dari hulu sampai hilir. Sejumlah artikel yang ditelaah konsisten menunjukkan bahwa ketika rantai pasok dikelola secara terstruktur, maka biaya logistik lebih efisien, pasokan lebih stabil, dan keterhubungan antara produsen lokal dengan unit layanan menjadi lebih kuat (Ashari et al., 2025; Aziizah et al., 2026; Aulia, 2026). Pada tingkat produksi, sumber pangan lokal yang paling sering muncul dalam literatur adalah hasil pertanian, perikanan, peternakan, serta produk olahan UMKM. Beberapa kajian menekankan bahwa daerah dengan potensi pangan kuat dapat memanfaatkan komoditas lokal sebagai bahan baku utama MBG karena kedekatan geografis mampu memperpendek jalur distribusi dan mengurangi ketergantungan terhadap pemasok dari luar wilayah (Aziizah et al., 2026; Siregar et al., 2025; Yakub et al., 2025; Mariyanto, 2025).

Dalam konteks ini, pangan lokal tidak hanya dipandang sebagai alternatif bahan pangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menumbuhkan pasar baru bagi petani, nelayan, koperasi, dan BUMDes. Artinya, rantai pasok MBG membawa fungsi ganda, yakni fungsi gizi dan fungsi pemberdayaan ekonomi daerah (Ashari et al., 2025; Aziizah et al., 2026; Kesumawardani & Hamimah, 2026). Pada tahap agregasi, temuan artikel menunjukkan bahwa keberadaan UMKM, koperasi, dan lembaga ekonomi desa sangat penting sebagai penghubung antara produsen skala kecil dan unit pelaksana MBG. Di beberapa studi, UMKM berperan sebagai penampung bahan baku, penyortir, pengemas, sekaligus penyedia produk yang telah disesuaikan dengan standar konsumsi sekolah. Pola ini membantu mengatasi persoalan skala produksi petani kecil yang tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan MBG secara langsung. Melalui model agregasi tersebut, distribusi menjadi lebih terorganisasi dan risiko putus pasok dapat dikurangi (Ashari et al., 2025; Aziizah et al., 2026; Aulia, 2026; Ramadhan & Khumaidi, 2025; Harold et al., 2025).

Temuan lain yang cukup dominan adalah pentingnya standarisasi mutu. Literatur yang membahas implementasi MBG menampilkan bahwa problem utama bukan hanya ketersediaan bahan pangan, tetapi juga konsistensi kualitas, keamanan, kesesuaian menu, dan ketepatan waktu pengiriman. Program berskala besar seperti MBG memerlukan prosedur penerimaan bahan, pengujian mutu, penyimpanan, dan pencatatan stok yang jelas agar bahan pangan yang masuk ke dapur layanan tetap aman dikonsumsi (Putri & Fairuzzaman, 2026). Dalam beberapa kasus, hambatan mutu ini muncul karena belum seluruh pemasok lokal memiliki kapasitas pascapanen yang memadai, sehingga masih diperlukan pembinaan teknis dan dukungan fasilitas penyimpanan (Aziizah et al., 2026; Subianto et al., 2026). Selain itu, hasil kajian juga memperlihatkan bahwa tata kelola rantai pasok MBG cenderung lebih efektif ketika berbasis data. Artikel yang menyoroti digitalisasi rantai pasok menekankan adanya kebutuhan terhadap sistem informasi stok, perencanaan kebutuhan menu, pemantauan ketersediaan bahan, dan pelacakan distribusi secara real-time. Kehadiran data tersebut membuat koordinasi antaraktor menjadi lebih transparan dan mengurangi ketidaksinkronan antara kapasitas pasok dan kebutuhan harian program (Aulia, 2026; Bajuri et al., 2026; Aramendi et al., 2023; Mckeen, 2021). Dengan demikian, tata kelola rantai pasok pangan lokal bukan sekadar proses fisik distribusi

barang, melainkan juga proses manajerial yang menuntut akurasi informasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Jika dilihat dari pola implementasi yang diuraikan dalam 28 artikel, hasilnya menunjukkan kecenderungan bahwa rantai pasok MBG lebih berkelanjutan apabila dibangun melalui kemitraan jangka panjang. Kemitraan tersebut mencakup kontrak pasok, pembagian peran yang jelas, mekanisme pengawasan mutu, dan dukungan pemerintah daerah dalam penguatan infrastruktur. Sebaliknya, ketika hubungan pemasok bersifat ad hoc, program menjadi rentan terhadap gangguan cuaca, ketidakpastian harga, dan keterlambatan pengiriman (Aziizah et al., 2026; Aulia, 2026; Bajuri et al., 2026). Oleh karena itu, hasil sintesis literatur menegaskan bahwa tata kelola rantai pasok pangan lokal dalam MBG harus dipahami sebagai sistem kolaboratif yang menuntut kesinambungan kelembagaan, bukan sebagai transaksi pengadaan sesaat.

Peran Pemerintah Daerah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Kontinuitas Distribusi dan Ketepatan Sasaran

Hasil telaah literatur memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan realitas lokal. Peran ini terutama tampak pada fungsi koordinasi lintas sektor, fasilitasi jejaring produsen, penyediaan dukungan regulasi daerah, dan pengawasan pelaksanaan program. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan keberhasilan program distribusi berbasis pangan lokal sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menyatukan dinas-dinas teknis, pelaku usaha lokal, lembaga pendidikan, dan aparat pengawasan dalam satu mekanisme kerja yang koheren (Prabowo, 2010; Putra et al., 2025; Yakub et al., 2025; Novita et al., 2025; Gunawan, 2025; Kabuam, 2026). Dalam hasil kajian, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga strategis. Daerah yang memiliki perencanaan pangan lebih baik cenderung mampu menghubungkan sumber produksi dengan kebutuhan MBG secara lebih stabil. Pada sejumlah artikel, pemerintah daerah digambarkan berperan dalam pemetaan potensi pangan lokal, identifikasi pemasok, fasilitasi pelatihan, serta penyediaan kebijakan pendukung bagi UMKM, koperasi, dan BUMDes agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok MBG (Aziizah et al., 2026; Partini & Sari, 2022; Kesumawardani & Hamimah, 2026). Peran ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola ekosistem pangan, bukan sekadar menyalurkan anggaran.

Salah satu temuan yang berulang adalah bahwa sinkronisasi pusat-daerah masih menjadi titik kritis. Beberapa artikel menampilkan kondisi ketika kebijakan pusat sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya belum didukung sepenuhnya oleh kesiapan daerah dalam hal data, SDM, infrastruktur, dan pengaturan teknis. Akibatnya, distribusi bahan pangan lokal kerap berjalan tidak seragam antardaerah. Daerah dengan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat cenderung mampu menjaga kontinuitas pasokan, sedangkan daerah dengan koordinasi yang lemah lebih rentan mengalami keterlambatan dan ketidaksesuaian stok (Hakim & Yuliana, 2025; Putra et al., 2025; Gunawan, 2025). Pada sisi operasional, SPPG muncul sebagai aktor yang sangat menentukan keberhasilan distribusi dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Literatur menunjukkan bahwa SPPG bertugas menerima bahan baku, menyiapkan proses pengolahan, mengatur penyimpanan, memastikan mutu makanan, dan mengirimkan makanan ke sekolah atau unit penerima. Dalam beberapa studi implementasi lokal, SPPG juga menjadi titik kontrol yang menentukan apakah menu benar-benar sampai kepada sasaran yang tepat dan dalam kondisi layak konsumsi.

(Putri & Fairuzzaman, 2026; Subianto et al., 2026). Dengan kata lain, SPPG adalah simpul operasional yang menghubungkan dimensi kebijakan dengan pengalaman nyata di lapangan.

Hasil telaah juga menunjukkan bahwa efektivitas SPPG sangat dipengaruhi oleh kompetensi petugas dan tersedianya sistem kerja yang jelas. Ketika petugas memahami prosedur keamanan pangan, jadwal distribusi, serta standar pelayanan, maka kualitas implementasi cenderung lebih baik. Sebaliknya, ketika kompetensi pelaksana masih terbatas, muncul risiko yang berkaitan dengan keterlambatan, kesalahan pengiriman, dan penurunan mutu makanan (Febryanti et al., 2025; Putri & Fairuzzaman, 2026). Beberapa artikel bahkan menegaskan bahwa beban administrasi yang terlalu tinggi dan kurangnya pendekatan humanis dapat mengurangi efektivitas layanan di tingkat sekolah (Agnia et al., 2025). Selain itu, ketepatan sasaran penerima manfaat juga menjadi salah satu hasil penting yang muncul dari studi yang ditelaah. Program MBG dinilai lebih efektif ketika mekanisme seleksi penerima manfaat dilakukan secara jelas, transparan, dan terhubung dengan data sekolah atau data wilayah sasaran. Hal ini penting untuk menghindari ketimpangan layanan antarsekolah dan memastikan bahwa kelompok yang memang membutuhkan memperoleh manfaat program secara proporsional (Febryanti et al., 2025). Di titik ini, koordinasi antara SPPG, sekolah, dan pemerintah daerah menjadi sangat menentukan.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan SPPG memiliki hubungan kerja yang saling melengkapi. Pemerintah daerah membangun kerangka kebijakan, jejaring, dan fasilitasi; SPPG menjalankan fungsi teknis operasional dan memastikan mutu layanan. Ketika keduanya berjalan selaras, kontinuitas distribusi dan ketepatan sasaran cenderung lebih terjaga. Namun, ketika koordinasi melemah, maka program lebih rentan menghadapi hambatan distribusi, ketidaksinkronan data, dan penurunan kualitas layanan (Bajuri et al., 2026; Agnia et al., 2025; Subianto et al., 2026).

Hambatan Struktural dan Kelembagaan dalam Implementasi Program MBG

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa hambatan implementasi MBG dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu hambatan struktural dan hambatan kelembagaan. Hambatan struktural terutama berkaitan dengan kondisi fisik dan logistik, sedangkan hambatan kelembagaan menyangkut tata hubungan antaraktor, regulasi, kapasitas organisasi, dan mekanisme koordinasi. Pola ini muncul berulang pada berbagai studi yang membahas MBG, pengadaan pangan publik, dan distribusi pangan lokal (Aziizah et al., 2026; Aulia, 2026; Bajuri et al., 2026). Pada aspek struktural, kendala yang paling sering muncul adalah fluktuasi pasokan musiman, keterbatasan transportasi, minimnya fasilitas cold storage, dan kondisi geografis yang menyulitkan distribusi. Studi-studi yang membahas pangan lokal dan implementasi MBG menegaskan bahwa bahan pangan segar sangat rentan terhadap keterlambatan distribusi dan penurunan mutu apabila infrastruktur penyimpanan belum memadai (Aziizah et al., 2026; Subianto et al., 2026). Hambatan ini semakin terasa pada daerah yang jarak antarpusat produksi dan lokasi sekolah cukup jauh atau memiliki akses jalan yang tidak stabil (Aziizah et al., 2026; Nathan, 2025).

Selain itu, ketergantungan pada pasokan harian juga menjadi persoalan tersendiri. Banyak artikel menunjukkan bahwa MBG memerlukan ketersediaan bahan yang konsisten setiap hari, sementara produksi pangan lokal kerap dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan kapasitas produksi petani atau nelayan kecil. Ketika perencanaan kebutuhan belum berbasis data yang kuat, ketidaksesuaian antara pasok dan

permintaan menjadi sulit dihindari (Aziizah et al., 2026; Aulia, 2026; Bajuri et al., 2026; Febryanti et al., 2025; Wahida et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketahanan program sangat bergantung pada kemampuan sistem rantai pasok untuk merespons variasi produksi lokal.

Pada sisi kelembagaan, hambatan yang paling dominan adalah koordinasi yang belum optimal antarinstansi. Sejumlah kajian menyebutkan bahwa kebijakan pangan sering kali masih berjalan sektoral, sehingga satu institusi fokus pada produksi, institusi lain pada distribusi, dan institusi lain pada pengawasan, tanpa mekanisme integrasi yang kokoh (Bajuri et al., 2026; Hakim & Yuliana, 2025; Fahrian & Putra, 2026; Wahida et al., 2025). Akibatnya, program MBG rentan menghadapi tumpang tindih kewenangan, lambatnya pengambilan keputusan, dan ketidakjelasan pembagian tugas antaraktor. Dalam konteks ini, lemahnya koordinasi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan faktor yang mempengaruhi kualitas layanan secara langsung. Hambatan kelembagaan juga tampak pada keterbatasan kapasitas SDM. Beberapa artikel implementatif menggambarkan bahwa petugas lapangan sering berhadapan dengan tuntutan kerja yang tinggi, mulai dari administrasi, pengawasan mutu, hingga distribusi. Jika kompetensi petugas tidak sejalan dengan kompleksitas tugas, maka efektivitas layanan menurun (Agnia et al., 2025; Putri & Fairuzzaman, 2026). Dalam beberapa kasus, kompetensi yang belum merata juga menyebabkan standar pelayanan antarwilayah berbeda-beda, sehingga ketimpangan implementasi menjadi semakin nyata.

Keterbatasan sistem informasi juga menjadi hambatan penting. Hasil telaah menunjukkan bahwa banyak masalah implementasi muncul karena tidak adanya data stok, data kebutuhan menu, dan data penerima manfaat yang terintegrasi secara real-time. Tanpa sistem informasi yang memadai, pengawasan sulit dilakukan, perencanaan pengadaan menjadi tidak presisi, dan potensi pemborosan meningkat (Aramendi et al., 2023; Mckee, 2021). Oleh karena itu, kelembagaan MBG membutuhkan dukungan teknologi yang mampu menghubungkan data produksi, logistik, dan distribusi dalam satu platform kerja yang konsisten. Di samping itu, beberapa artikel menyoroti dimensi yuridis dan akuntabilitas sebagai hambatan yang juga mempengaruhi implementasi. Kajian hukum menekankan bahwa legitimasi kelembagaan, pembagian kewenangan, serta pengaturan tanggung jawab pemerintah dan SPPG perlu dirumuskan secara lebih jelas agar pelaksanaan program tidak menimbulkan kekosongan tanggung jawab ketika terjadi masalah di lapangan (Hakim & Yuliana, 2025; Fahrian & Putra, 2026). Dalam konteks ini, hambatan kelembagaan bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal kejelasan norma dan jaminan akuntabilitas publik.

Hasil yang dapat ditarik dari seluruh artikel ialah bahwa implementasi MBG membutuhkan ekosistem pendukung yang tidak sederhana. Program akan sulit berjalan stabil apabila infrastruktur logistik lemah, koordinasi antarlembaga terfragmentasi, kapasitas pelaksana belum kuat, dan sistem informasi belum terintegrasi. Sebaliknya, bila hambatan struktural dan kelembagaan tersebut diatasi, MBG memiliki peluang besar untuk menjadi program yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi ketahanan pangan daerah (Ashari et al., 2025; Aziizah et al., 2026; Aulia, 2026; Aramendi et al., 2023; Kesumawardani & Hamimah, 2026; Kabuam, 2026).

HASIL PEMBAHASAN

Tata Kelola Rantai Pasok Pangan Lokal sebagai Basis Keberhasilan MBG

Hasil penelitian pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola rantai pasok pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung melalui rangkaian proses yang saling terhubung, mulai dari produksi, agregasi, pengolahan, hingga distribusi ke penerima manfaat. Temuan tersebut menegaskan bahwa MBG tidak dapat dibaca semata sebagai program pemberian makanan, melainkan sebagai sistem tata kelola pangan publik yang menuntut keterhubungan antarlembaga dan antarpelaku secara berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas desain rantai pasok yang dibangun di atas potensi pangan lokal. Keterhubungan antara produsen lokal, UMKM, koperasi, BUMDes, dan SPPG memperlihatkan bahwa rantai pasok MBG memiliki dimensi ekonomi yang kuat. Pada titik ini, pangan lokal tidak hanya berfungsi sebagai sumber bahan baku, tetapi juga sebagai instrumen penguatan pasar domestik. Temuan hasil menunjukkan bahwa semakin dekat lokasi produksi dengan lokasi distribusi, maka semakin besar efisiensi yang dihasilkan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip bahwa rantai pasok pendek mampu menekan biaya logistik, mengurangi risiko keterlambatan, serta menjaga kesegaran dan mutu bahan pangan.

Dalam konteks ini, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa MBG memiliki potensi menjadi alat transformasi ekonomi lokal. Keterlibatan pelaku usaha kecil dan lembaga ekonomi desa tidak hanya memperluas basis penyedia bahan pangan, tetapi juga menciptakan efek pengganda terhadap pendapatan masyarakat. Artinya, kebijakan MBG dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal apabila pengadaan bahan bakunya memang diarahkan pada sumber daya daerah. Hal tersebut memperkuat argumen bahwa ketahanan pangan dan penguatan ekonomi lokal merupakan dua tujuan yang dapat dicapai secara bersamaan. Namun, hasil juga menunjukkan bahwa rantai pasok pangan lokal tidak selalu berjalan mulus. Ketika pasokan bergantung pada musim, cuaca, dan kapasitas produksi yang terbatas, maka kontinuitas bahan pangan menjadi rentan. Karena itu, pembahasan terhadap temuan ini perlu diarahkan pada pentingnya perencanaan pasok yang berbasis data.

Rantai pasok MBG memerlukan mekanisme peramalan kebutuhan, pencatatan stok, dan koordinasi logistik yang mampu merespons perubahan kondisi di lapangan. Tanpa itu, program akan mudah mengalami ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan. Lebih jauh, temuan mengenai standarisasi mutu menunjukkan bahwa keberhasilan rantai pasok tidak cukup diukur dari tersedianya bahan pangan, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam menjamin keamanan dan konsistensinya. Standarisasi menjadi penting karena MBG menyangkut konsumsi kelompok rentan, yakni peserta didik. Oleh sebab itu, pembahasan hasil ini menegaskan bahwa rantai pasok pangan lokal harus dipandang sebagai sistem mutu yang mencakup pengawasan, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi, bukan hanya aktivitas pengiriman barang.

Peran Pemerintah Daerah dan SPPG dalam Menjaga Kontinuitas Distribusi dan Ketepatan Sasaran

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi MBG. Hal ini dapat dipahami karena daerah berada pada posisi yang paling dekat dengan produsen pangan, jaringan distribusi, dan sasaran penerima manfaat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada kebijakan

nasional, tetapi sangat ditopang oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola jejaring lokal, menyusun koordinasi lintas sektor, dan memfasilitasi integrasi antara kebutuhan program dengan potensi pangan daerah. Peran pemerintah daerah dalam pembahasan ini dapat dibaca sebagai bentuk *capacity for coordination*. Artinya, daerah bukan hanya pelaksana administratif, tetapi juga pengatur hubungan kerja antarlembaga. Dari hasil yang telah disusun, terlihat bahwa keberhasilan distribusi pangan sangat dipengaruhi oleh adanya sinergi antara dinas teknis, pelaku usaha lokal, sekolah, dan lembaga pengawas. Jika koordinasi ini kuat, maka alur distribusi cenderung lebih stabil; sebaliknya, jika koordinasi terfragmentasi, maka program mudah menghadapi ketidaksinkronan stok, keterlambatan pengiriman, dan ketidaktepatan sasaran.

Temuan mengenai SPPG juga memberikan penegasan penting. SPPG bukan sekadar unit pelaksana dapur, tetapi simpul operasional yang menentukan apakah menu benar-benar sampai kepada penerima manfaat dalam kondisi layak konsumsi. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa SPPG memegang fungsi kunci pada tahap penerimaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengaturan porsi, hingga distribusi. Dengan demikian, kualitas layanan MBG pada dasarnya banyak ditentukan oleh kapasitas SPPG dalam menjalankan fungsi teknis secara disiplin dan konsisten. Pembahasan atas temuan ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berhak menerima program, tetapi juga oleh seberapa baik sistem pendataan dan komunikasi antarlembaga dijalankan. SPPG membutuhkan data yang akurat dari sekolah maupun pemerintah daerah agar distribusi tidak meleset dari sasaran. Ketika data sasaran tidak sinkron dengan kondisi lapangan, risiko ketimpangan layanan antarsekolah akan meningkat. Oleh karena itu, sistem informasi yang terhubung menjadi kebutuhan mendasar dalam menjamin keadilan distribusi. Selain itu, hasil penelitian juga menegaskan bahwa hubungan kerja antara pemerintah daerah dan SPPG perlu dibangun dalam kerangka *collaborative governance*.

Dalam kerangka ini, keberhasilan program bukan hasil kerja satu lembaga, melainkan hasil kolaborasi yang diatur secara jelas. Pemerintah daerah menyediakan dukungan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan; SPPG menjalankan fungsi teknis operasional; sementara sekolah dan pemasok lokal memberi dukungan data dan bahan baku. Jika seluruh unsur ini bekerja selaras, maka kontinuitas distribusi dan ketepatan sasaran dapat lebih mudah dijaga. Dengan kata lain, hasil penelitian mendukung pandangan bahwa implementasi MBG akan lebih efektif apabila pemerintah daerah dan SPPG diposisikan sebagai dua aktor utama yang saling melengkapi. Pemerintah daerah menjaga lingkungan kebijakan dan ekosistem pangan lokal, sedangkan SPPG menjaga kualitas layanan pada level implementasi. Pembagian peran yang jelas semacam ini akan memperkuat ketahanan program sekaligus meminimalkan gangguan operasional di lapangan.

Hambatan Struktural dan Kelembagaan serta Arah Penguatan Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBG masih menghadapi hambatan struktural dan kelembagaan yang cukup kompleks. Hambatan struktural terutama berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur logistik, fluktuasi pasokan, keterbatasan cold storage, serta kondisi geografis yang menyulitkan distribusi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan MBG memerlukan dukungan fisik yang kuat agar bahan pangan tetap dapat bergerak secara efisien dari produsen ke penerima manfaat. Secara teoritis, hambatan struktural memperlihatkan bahwa program pangan publik berskala besar tidak dapat berjalan hanya dengan komitmen kebijakan. Infrastruktur penyimpanan, transportasi, dan distribusi merupakan

prasyarat material yang harus disiapkan. Jika infrastruktur ini lemah, maka kualitas pangan akan rentan menurun dan jadwal distribusi sulit dipenuhi. Karena itu, pembahasan hasil ini menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pangan harus dibaca sebagai bagian dari kebijakan gizi, bukan sebagai isu pendukung yang berdiri sendiri.

Di sisi kelembagaan, temuan memperlihatkan adanya persoalan koordinasi, fragmentasi regulasi, keterbatasan kompetensi SDM, dan belum optimalnya sistem informasi terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi MBG masih membutuhkan penguatan organisasi dan kejelasan tata hubungan kerja. Program yang melibatkan banyak aktor hanya akan efektif jika setiap pelaksana memahami tugas, kewenangan, dan alur komunikasi secara jelas. Jika tidak, maka program akan cenderung berjalan parsial dan sulit mencapai kesinambungan. Temuan mengenai digitalisasi rantai pasok juga sangat penting dalam pembahasan ini. Sistem informasi real-time dibutuhkan untuk memantau stok, merencanakan kebutuhan, dan mengurangi risiko mismatch antara pasokan dan permintaan. Dalam konteks MBG, digitalisasi bukan hanya alat bantu administratif, tetapi instrumen tata kelola yang dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kecepatan respons. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital merupakan bagian dari reformasi kelembagaan MBG. Selain itu, hasil kajian juga memperlihatkan bahwa aspek yuridis dan akuntabilitas tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan implementasi. Ketika pembagian kewenangan belum sepenuhnya jelas, maka risiko tumpang tindih tugas dan lemahnya pertanggungjawaban akan semakin besar.

Karena itu, regulasi yang lebih operasional diperlukan untuk menjabarkan hubungan antara pusat, daerah, SPPG, dan sekolah secara lebih tegas. Hal ini penting agar program tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga kuat secara pelaksanaan. Dari keseluruhan hasil, dapat dipahami bahwa arah penguatan implementasi MBG perlu mencakup tiga hal utama: pertama, penguatan infrastruktur logistik dan penyimpanan; kedua, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pelaksana; ketiga, integrasi data dan digitalisasi rantai pasok. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar agar MBG dapat bergerak dari program yang bersifat distributif menuju sistem pangan publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa hambatan yang ditemukan dalam hasil bukanlah hambatan kecil yang berdiri sendiri, melainkan gejala dari kebutuhan reformasi tata kelola yang lebih luas. MBG akan lebih kuat bila dipahami sebagai kebijakan lintas sektor yang memerlukan dukungan infrastruktur, kelembagaan, dan teknologi secara simultan.

Implikasi Temuan Terhadap Kemandirian Pangan Berkelanjutan

Jika seluruh hasil dibaca secara utuh, maka tampak bahwa MBG memiliki potensi besar sebagai instrumen menuju kemandirian pangan berkelanjutan. Pemanfaatan pangan lokal memperkuat basis produksi daerah, peran pemerintah daerah memperkuat koordinasi kebijakan, dan peran SPPG memastikan implementasi teknis berjalan efektif. Ketiga unsur ini menciptakan arsitektur kebijakan yang bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperkuat daya tahan sistem pangan lokal. Temuan penelitian juga memberikan implikasi bahwa keberlanjutan program sangat ditentukan oleh kemampuan membangun jejaring pangan yang inklusif. Keterlibatan petani, nelayan, UMKM, koperasi, dan BUMDes menunjukkan bahwa MBG dapat menjadi program yang membuka ruang partisipasi ekonomi bagi masyarakat lokal. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menciptakan sistem pangan yang lebih mandiri karena produksi, distribusi, dan konsumsi dikelola

melalui mekanisme yang lebih dekat dengan sumber daya wilayah. Karena itu, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menegaskan bahwa MBG tidak cukup diperlakukan sebagai kebijakan konsumsi jangka pendek. MBG perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan pangan nasional yang berbasis wilayah, berbasis kolaborasi, dan berbasis keberlanjutan. Apabila arah ini diperkuat, maka program akan memiliki nilai strategis yang lebih luas: menyehatkan peserta didik, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar kebijakan penyediaan makanan bagi peserta didik. MBG merupakan instrumen tata kelola pangan publik yang menuntut keterhubungan yang kuat antara produksi lokal, pengadaan bahan baku, pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu. Karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan sistem pangan daerah dalam menjaga ketersediaan, kualitas, dan kesinambungan pasokan.

Pertama, tata kelola rantai pasok pangan lokal dalam program MBG perlu disusun secara terintegrasi agar mampu mendukung kebutuhan program secara stabil. Pemanfaatan pangan lokal bukan hanya memperpendek jalur distribusi dan menekan biaya logistik, tetapi juga memperkuat posisi petani, nelayan, UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai bagian dari ekosistem penyedia pangan. Dengan demikian, MBG dapat menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.

Kedua, pemerintah daerah dan SPPG memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah daerah berfungsi sebagai koordinator kebijakan, fasilitator kemitraan, serta penghubung antara produsen lokal dan unit pelaksana program. Sementara itu, SPPG menjadi aktor operasional yang memastikan bahan pangan diterima, diolah, dan didistribusikan sesuai standar mutu, keamanan, dan jadwal yang ditetapkan. Tanpa koordinasi yang kuat antara keduanya, program berpotensi menghadapi keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian stok, dan turunnya kualitas pelayanan.

Ketiga, hambatan utama yang dihadapi implementasi MBG berasal dari faktor struktural dan kelembagaan, seperti fluktuasi pasokan musiman, keterbatasan cold chain, minimnya sistem informasi logistik, kapasitas pelaksana yang belum merata, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Oleh sebab itu, penguatan kebijakan ke depan perlu diarahkan pada standardisasi mutu, pengembangan sistem digital rantai pasok, peningkatan kapasitas SDM, dan pembentukan kemitraan jangka panjang dengan produsen lokal. Dengan langkah tersebut, MBG berpeluang menjadi program yang tidak hanya menyehatkan generasi muda, tetapi juga mendorong kemandirian pangan berkelanjutan dan pemerataan manfaat ekonomi di tingkat daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH (Bila ada)

Jika diperlukan ucapan terima kasih (*acknowledgment*) misalnya kepada penyandang dana dalam kegiatan penelitian keproyekan. Ditulis dalam satu paragraf maksimal 8 baris.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnia, N., Asyifa, R., Himawan, A. F., Makarim, S. N., & Rahardian, R. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan*, 5(September).
- Aramendi, A. O., Zubillaga, M. B., & Padilla, M. C. (2023). Characterisation of food governance for alternative and sustainable food systems : a systematic review. *Agricultural and Food Economics*, 11, 1–32. <https://doi.org/10.1186/s40100-023-00258-7>
- Arifin, A. L., & Solihin, D. (2025). Hilirisasi Pangan Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansu Kewirausahaan*, 5(2), 19–27.
- Ashari, Nursamsir, & Saputra, I. G. P. E. (2025). Pengembangan Model Optimalisasi Rantai Pasok Pangan Laut Berbasis Smart Fisheries Village Untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis di Desa Tanggetada meningkatkan efisiensi distribusi , partisipasi nelayan berbasis komunitas , perluasan akses pasar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 9(3), 1139–1150. <https://doi.org/10.29408/jpek.v9i3.33318>
- Aulia, H. (2026). Manajemen Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional : Studi Literatur Hani Aulia Laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2024 juga menunjukkan bahwa dunia masih belum berada pada jalur yang m. *Jurnal Ilmiah Ekonomu Dan Manajemen (JIEM)*, 4(4), 193–205.
- Aziizah, D. U., Widzayanto, L. A., Muarifudin, & Ripan. (2026). Optimalisasi Rantai Pasok Pangan Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus Integrasi UMKM dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kab. Kendal. *Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 5(1), 240–254. <https://doi.org/10.56113/takuana.v5i1.475>
- Bajuri, D., Jannah, N., Fitria, L., Sugiarto, S., Fatimah, E. S., & Elawati. (2026). Kebijakan Tata Kelola Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Terhadap Kelayakan Implementasi Berkelanjutan Yang Berdampak Secara Multiplier Effect Dengan Pemanfaatan Teknologi. *Jurnal Educatio*, 12(1), 89–97.
- Fahrian, Z., & Putra, M. A. P. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Resiko Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Skema Kemitraan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(2).
- Febryanti, I., Indiaty, Pane, M. A., & Astuti, P. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (mbg) (studi kasus pada sdn 3 kepanjen kabupaten malang). *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 67–79.
- Gunawan, G. R. (2025). Koordinasi Lintas Sektor dalam Menjaga Ketahanan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya. *Thesis*, 1–18.
- Hakim, B. N., & Yuliana, W. (2025). Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis. *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 267–283.
- Harold, R., Mantali, M., Bau, F., Andre, M., Djafar, S., Ismail, Y., Birahim, S. A., Bumulo, Y. W., Antau, S. M., Olga, N., Medellu, O., Rajid, A., Ahmad, A. H., Nusu, V., Umar, R., Ali, Y., Polamolo, E. B., & Duslan, M. (2025). Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan di Desa Molutabu , Kecamatan Kabila Bone The Role of BUMDes in Enhancing Farmers ' Welfare and Food Security in Molutabu Village , Kabila Bone District. *Sosiologi Jurnal*

- Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 148–159.
- Kabuam, W. (2026). Tata Kelola Ketahanan Pangan Daerah Perbatasan : Sinergi Pemerintah dan Komunitas Lokal di Merauke. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 3356–3368.
- Kesumawardani, T., & Hamimah, S. (2026). Optimalisasi Kebijakan Hukum Dan Inovasi Teknologi Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan. *Science and Education Journal*, 5(2), 315–322.
- Mariyanto, J. (2025). Strategi Kebijakan Industri Pangan Lokal sebagai Antisipasi Menghadapi Krisis Pangan Global di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 2(2), 55–73.
- Mckeen, N. (2021). Global Food Governance. *Development*, 64(1), 48–55. <https://doi.org/10.1057/s41301-021-00299-9>
- Nathan, I. A. (2025). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan : Sinergi Kebijakan dan Administrasi Publik di Merauke. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1573–1591.
- Novita, W., Ak, A. T., & Wadjdi, F. (2025). Implementasi Kebijakan Perbapanas Nomor 10 Tahun 2022 Serta Faktor – Faktor Pendukung Dan Penghambat Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Agroteksos*, 35(2), 781–795.
- Partini, & Sari, I. (2022). Kebijakan Pengembangan Ketahanan Pangan Lokal. *Jurnal Agribisnis Unisi*, 11(1), 78–83.
- Prabowo, R. (2010). Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Kebijakan Pemerintah Dalam Negeri*, 6(2), 62–73.
- Putra, I. P., Aziza, N. N., Putri, N. R., Kamila, T. N., & Mufidah, G. H. (2025). Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Tangerang. *Arrus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(3).
- Putri, S. D. A., & Fairuzzaman, F. (2026). Pertanggungjawaban Pemerintah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Serta Upaya Hukum bagi Korban Keracunan. *UMS Library*, 1–12.
- Ramadhan, R., & Khumaidi. (2025). Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Program Ketahanan Pangan Di Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Al-Faqih: Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, Teknik*, 1(4), 114–126.
- Siregar, L. A., Wulandari, D., & Retnaningsih, C. (2025). Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal: Studi Literatur sebagai Transformasi Pangan Menuju Indonesia Maju 2045. *Prosiding Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi (USDB)*, 3.
- Subianto, M. J., Ussolihin, I., Algifari, M. I. T., Adrian, R. A., & Guspita, D. R. (2026). Evaluasi Komprehensif Dan Analisis Yuridis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 : Akuntabilitas Fiskal , Utilitas Sosial, Dan Patologi Kepatuhan Mitra. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(5), 878–888.
- Wahida, Perdana, R. P., Septanti, K. S., Suryana, E. A., Ulpah, A., Raharjo, A. S. S., Suharyono, S., Yuliani, F., & Pusat. (2025). Dinamika tingkat kemandirian pangan: implikasinya terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 23(1), 37–55. <https://doi.org/10.21082/akp.v23n1.2025.37-55>
- Yakub, Hamzah, M., & Rasdi. (2025). Strategi Petani dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitasi Dan Pelayanan Publik*, 12, 1603–1615.